

**ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS**

*ANALYSIS OF ACHIEVEMENT OF MINIMUM SERVICE STANDARDS IN HEALTH SECTOR  
IN PUBLIC HEALTH OFFICE OF KAPUAS REGENCY*

Nina Maulida<sup>1</sup>, Asrinawaty<sup>2</sup>, M. Febriza Aquarista<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM. 19070068

<sup>2</sup>Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1107118303

<sup>3</sup>Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1116128801

E-mail:ninaamaulydaa@gmail.com

**ABSTRACT**

*Minimum Service Standards (SPM) is one of the national strategic programs that every citizen has the right to receive at a minimum. In Law Number 23 of 2014 concerning local government, health is one of the obligatory matters and is related to basic services. Health SPM is intended for districts/cities covering 12 types and quality of basic services and must meet the target of 100% in each indicator. The aim of the study was to analyze the achievement of the Minimum Health Service Standards in Kapuas District based on input, process and output components. The research method uses a qualitative approach. The results showed that the data input components and SOPs were available, but the quantity of human resources was inadequate. Based on the service process components in the health sector, it could be implemented by empowering existing human resources. And based on the output for health offices that do not achieve SPM in the form of verbal and written sanctions. Of the 12 types of health services, only 2 indicators meet the MSS. The suggestions and expectations of the health office remain consistent in the implementation of the implementation of the MSS in the health sector, it is necessary to increase the quality and quantity of human resources, strengthen coordination and the role between the central and regional governments in achieving the MSS in the health sector.*

**Keywords :** Health, Achievement, Minimum Service Standard (MSS)

---

**ABSTRAK**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu program strategis nasional yang berhak di dapatkan setiap warga negara secara minimal. Pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kesehatan merupakan salah satu dari urusan wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. SPM kesehatan dimaksudkan bagi kabupaten/kota mencakup 12 jenis dan mutu layanan dasar dan harus memenuhi target 100% disetiap indikatornya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pencapaian Standar Pelayanan Minimal kesehatan di Kabupaten Kapuas berdasarkan komponen input, proses dan output. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan komponen input data dan SOP sudah tersedia akan tetapi kuantitas SDM belum memadai. Berdasarkan komponen proses pelayanan bidang kesehatan bisa dilaksanakan dengan memberdayakan SDM yang sudah ada. Dan berdasarkan output bagi dinas kesehatan yang tidak mencapai SPM dalam bentuk sanksi secara lisan dan tertulis. Dari 12 jenis pelayanan kesehatan hanya 2 indikator yang memenuhi SPM. Saran dan harapan dinas kesehatan tetap konsisten dalam pelaksanaan penerapan SPM bidang kesehatan, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, penguatan koordinasi dan peran antar pemerintah pusat dan daerah dalam pencapaian SPM bidang kesehatan.

**Kata Kunci :** Kesehatan, Pencapaian, Standar Pelayanan Minimal (SPM)

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009> [diakses 4 Maret 2023]
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. [https://e-renggar.kemkes.go.id/file\\_performance/1-131313-1tahunan-128.pdf](https://e-renggar.kemkes.go.id/file_performance/1-131313-1tahunan-128.pdf) [diakses 12 April 2023]
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196234/permendagri-no-59-tahun-2021> [diakses 5 Maret 2023]
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111713/permenkes-no-4-tahun-2019> [diakses 4 Maret 2023]
- Zudi, M., Suryoputro, A., & Arso, S. P. (2021). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Guntur I Kabupaten Demak. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 8(2), 165-179
- Rochmawati, I., & Sari, A. R. (2022). *Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Perbatasan*. Penerbit NEM.
- Aliyah, Y. A. N. (2020). Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus di Kota Bandung Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume*, 46(2), 355-368.
- Kabupaten Kapuas. 2016. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Pemerintah Kabupaten Kapuas: Kapuas.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. (2022), Laporan Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, Kabupaten Kapuas 2022: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-3. Bandung: Alfabeta.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Fatharani, R. (2022). Analisis Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 di Puskesmas Langsa Baro Tahun 2021. *Journal Scientific of Mandalika*, 3(2), 589-596.
- Attriani, A. N. (2022). Tantangan Dan Isu Strategis Sumber Daya Kesehatan Manusia Kesehatan Pada Puskesmas Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(3), 363-368.